

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Suhendri, Ria Nelly Sari & M. Rasuli

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

E-mail: hendrisholeh1982@gmail.com

ABSTRACT

Non-Cash Transactions (TNT) in Regional Governments are one of the efforts to improve transparency and accountability in regional financial management in local government This is regulated through the issuance of Presidential Instruction Number 10 of 2016 concerning Action for the Prevention and Eradication of Corruption in 2016 and 2017 and Circular of Minister of Home Affairs 910/1867 / SJ in 2017 concerning the Implementation of Non-Cash Transactions in Regency / City Governments. Based on Circular of Minister of Home Affairs 910/1867 / SJ in 2017, local governments are required to begin the implementation of non-cash transactions no later than January 1, 2018 which includes transactions conducted by treasurers of revenues and expenses. However, a number of local governments are still experiencing obstacles in the implementation of non-cash transactions and only around 40% of APKASI members are ready to implement non-cash transactions. This is because there are still many local governments that do not yet have human resources (HR) besides that they do not have adequate infrastructure to implement non-cash transaction. The purposes of this study are to examine and analyze the influence of Organizational Commitment, Regulation, the Competency of Human Resources (HR) and Information Technology on the implementation of non-cash transactions. This research is a perception research with a quantitative approach. The population of this research is all the State Civil Apparatus (ASN) in Indragiri Hulu Regency from 31 Local Government agencies (OPD). Respondents of this study were Local Government Financial Officer and Technical Officer (PPTK) at the OPD of Indragiri Hulu Regency. Based on the purposive sampling approach, a sample of 159 respondents was obtained. Data was then analyzed by using SmartPLS version 3.2.1.m3. The results of the study show that Organizational Commitment, Competence of Human Resources (HR) and Information Technology have a positive influence on the implementation of non-cash transactions, while the Regulation has no influence on the implementation of non-cash transactions.

Keywords: *Organizational commitment, regulation, human resources (HR), information technology and Non-cash transactions.*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah senantiasa memperbaharui setiap kebijakan dan peraturan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2016 dan 2017 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang berisi tiga aspek utama salah satunya adalah percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) di Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Pemda. Inpres ini dikeluarkan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan dan akuntabel. Dalam upaya peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut maka pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada tanggal 17 April 2017. SE Mendagri tersebut menekankan bahwa pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan implementasi transaksi non tunai paling lambat 1 Januari 2018 yang meliputi transaksi di bendahara penerimaan dan pengeluaran. Transaksi non tunai yang dimaksud adalah proses pemindahan uang dan pembayaran yang tidak lagi dilakukan secara tunai, tetapi dilakukan secara non tunai dari satu pihak ke pihak lain.

Implementasi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud juga merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan negara dalam upaya mengadopsi internasional *best practice* yaitu adopsi mengikuti model *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS). Transformasi ini dilakukan karena konsekuensi atas kemajuan pengelolaan keuangan negara sejak tahun 2003 dan implementasi akuntansi basis akrual yang mengadopsi *internasional best practice* dari model *Treasury Reference Model* (TRM) atau model referensi perbendaharaan sebagai upaya integrasi teknologi ke dalam sistem pengelolaan keuangan negara.

Dilihat dari beberapa aspek, penerapan implementasi transaksi non tunai secara penuh akan dapat mengurai permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dinilai kurang transparan dan akuntabel. *Pertama*, dari aspek penatausahaan pengelolaan keuangan, implementasi transaksi non tunai dapat mengurangi pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang sah sebagai akibat dari pengelolaan uang persediaan dalam bentuk uang tunai yang terlalu besar yang berada di bendahara pengeluaran. *Kedua*, dari aspek penerimaan pajak negara, kecenderungan keterlambatan pembayaran pajak akan dapat dihilangkan karena sistem perbankan yang langsung dapat melaksanakan pemotongan dan penyetoran secara non tunai ke kas negara seperti penggunaan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2) yang terintegrasi dengan Bank Persepsi. Implementasi ini akan dapat meningkatkan penerimaan di bidang pajak serta lebih mudah diakses oleh kantor pajak dan lebih akurat karena mudah dilacak. (Todung Mulya Lubis (2013) dalam : Perangi Korupsi, Batasi Transaksi Tunai).

Ketiga, dari aspek penatausahaan penerimaan kas, implementasi transaksi non tunai menjadi bagian dari sistem pengendalian kas. Menurut Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Rajagukguk (2013) penerapan sistem transaksi non tunai dalam penyelenggaraan keuangan negara dapat mencegah tindakan korupsi atau penyelewengan keuangan negara sejak dini (www.beritasatu.com). *Keempat*, dari aspek pencatatan laporan keuangan, implementasi transaksi non tunai dapat mengurangi permasalahan seperti tidak terlaksananya catatan keuangan secara *real time*, serta tidak terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan sistem perbankan sehingga mengakibatkan laporan kas yang ada di tangan dan kas yang ada di Rekening Giro Bendahara sebagai pengelola keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak dapat diketahui secara *real time*.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Mardani H. Maming (2018) menyatakan bahwa sejumlah Pemda masih mengalami kendala dalam penerapan transaksi non tunai. Hal ini disebabkan karena masih banyak pemda yang belum mempunyai SDM dan infrastruktur yang

mumpuni untuk menerapkannya. Menurutnya baru sekitar 40% anggota APKASI yang siap untuk mengimplementasikan transaksi non tunai (<https://apkasi.org>). Artinya hampir 60% pemerintah daerah diseluruh Indonesia masih menghadapi kendala dalam penerapan transaksi non tunai. Kebanyakan organisasi pemerintah belum mampu melaksanakan dan menerapkannya. Pemda juga belum menjadikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terintegrasi dengan *Cash Management System* (CMS) perbankan, baik pemerintah provinsi hingga ketinggian pemerintah kabupaten atau kota. Permasalahan ini menjadi masalah bagi hampir semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Begitu juga dengan pemda Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau.

Belum optimalnya implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu diduga disebabkan karena beberapa masalah berikut. Berdasarkan hasil wawancara pra riset yang dilakukan peneliti kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi masalah. Faktor *pertama*, adalah komitmen. Dalam hal efektifitas implementasi transaksi non tunai maka komitmen sebagai sebuah kesepakatan harus dibangun dengan melibatkan seluruh pihak terkait pada OPD khususnya pengelola keuangan dan PPTK yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan sistem pembayaran. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa komitmen yang ada dalam Instruksi Bupati Indragiri Hulu seperti adanya batasan transaksi di bendahara penerimaan paling tinggi Rp. 1.000.000,-, kenyataannya masih ditemukan transaksi penerimaan diatas Rp. 1.000.000,- dilaksanakan secara tunai.

Kedua, regulasi dalam Instruksi Bupati Indragiri Hulu tersebut tidak disosialisasikan dengan baik kepada pihak-pihak terkait sebagai pelaksana implementasi. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman ASN mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang instruksi bupati tersebut. Peraturan yang dimaksud merupakan pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Perubahan sistem transaksi non tunai memunculkan persoalan yang cukup kompleks, seperti belum adanya sosialisasi dan bimtek tentang Transaksi Non Tunai secara komprehensif kepada seluruh pengelola keuangan dan PPTK pada OPD yang ada di kabupaten Indragiri Hulu.

Ketiga, kompetensi SDM yang dimiliki tidak sesuai dengan jabatan yang diemban. Walaupun komitmen dan regulasi tentang Implementasi TNT di Kabupaten Indragiri Hulu telah dinyatakan dan dibuat, seharusnya juga didukung oleh kompetensi sumberdaya manusia yang memadai sebagai pelaksana implementasi. Data BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017 menunjukkan bahwa masih terdapat pengelola keuangan berpendidikan SMA sebesar 30,96%, dan terdapat pula pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang diemban sebesar 36%. Hal ini tentu dapat menimbulkan masalah karena rendahnya pendidikan akan menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap pekerjaan yang diemban dan ketidaksesuaian bidang ilmu yang dimiliki juga akan berdampak pada pekerjaan sebagai pengelola keuangan.

Keempat, adalah teknologi informasi, kompleksitas dari sistem transaksi non tunai dan tingginya volume transaksi ekonomi di daerah sudah seharusnya diperlukan ketersediaan sarana pendukung yang memadai, berupa *hardware* maupun *software* dan lain-lain. Faktanya pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum memanfaatkan penggunaan teknologi informasi (terkomputerisasi dan pemanfaatan Sistem informasi) dengan baik. Seharusnya Aplikasi Keuangan yaitu

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sudah terintegrasi dengan *Cash Management System* (CMS) perbankan, sehingga segala transaksi non tunai dapat berjalan dengan mudah, cepat, efektif dan efisien.

Teori George Edwards III (1980) menjelaskan terdapat 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Edwards III dalam Subarsono (2011; 90), menjelaskan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumberdaya pendukung lainnya. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* (melaksanakan) kebijakan secara efektif. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dalam bentuk komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi.

Menurut Edwards III (1980) ada beberapa jenis kebijakan yang pada dasarnya mudah menemui permasalahan dalam pengimplementasiannya seperti kebijakan yang bersifat *New Policies* (kebijakan baru). Kemudian *Decentralized Policies*, Kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, namun program pengimplementasiannya di serahkan pada masing-masing daerah. Kesulitan yang timbul dikarenakan interpretasi yang bisa jadi beragam antar daerah dan juga kesiapan daerah yang masing-masing tidak sama, sehingga pengimplementasian dan hasilnya pun bisa berbeda dari tujuan utama kebijakan tersebut.

Bertitik tolak pada fakta-fakta dan teori-teori di atas, dengan memiliki subjek, objek penelitian dan metode yang relevan dengan permasalahan implementasi transaksi non tunai, maka dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau yaitu: Komitmen Organisasi, Kompetensi SDM, Regulasi dan Teknologi Informasi.

Beberapa penelitian yang menjadi referensi peneliti berkenaan dengan penerapan aturan baru tentang pengelolaan sistem keuangan daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Lukman Pasaribu (2016), Ni Made Sudiarianti (2015), yang menemukan bahwa komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi basis akrual dan Kompetensi SDM Penerapan SPIP dan SAP memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Sementara dari sisi regulasi, penelitian Fatimah Zuria (2016), menemukan bahwa secara simultan regulasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan secara parsial variabel regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Rahmansah (2012) yang menyatakan bahwa regulasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Fadilah Madjid (2016) menemukan bahwa pengembangan regulasi tidak mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual.

Dilihat dari faktor Teknologi Informasi, penelitian Desi Indriasari (2010) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Seperti halnya Desi Indriasari (2010), Deswati Supra (2016), Lukman Pasaribu (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas teknologi informasi merupakan variabel independen yang paling mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual dan secara parsial variabel teknologi SIMDA berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan akuntansi basis akrual. Sedangkan (Kusuma, 2013; Fatimah Zuria, 2016), menemukan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual dan perangkat pendukung (Teknologi Informasi) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian lain yang menjadi referensi terkait implementasi transaksi non tunai, dikembangkan dari penelitian Nikesari dan Roy (2017), menemukan bahwa Implementasi Transaksi Non Tunai jika dikaji melalui teori *Mckinsey 7 framework*. Menunjukkan bahwa berbagai aspek seperti strategi, struktur, *sistem, skill & staffing* serta *style & shared value* kesemuanya berperan penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai (*non cash*). Sedangkan Santi (2018), mengungkapkan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari prosedur pembayaran mekanisme non tunai (*non cash*) untuk pengeluaran APBD sudah berjalan sesuai instruksi Walikota Yogyakarta nomor 3 tahun 2017. Pembayaran non tunai juga sudah dilakukan dengan menggunakan *Cash Management System (CMS)* yang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah DIY.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nikesari dan Roy (2017) dan Santi (2018) yang meneliti tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada BPKAD Propinsi DKI Jakarta dan BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta. Kedua penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga hasil penelitian mereka tidak dapat di generalisasi pada pemerintah daerah yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan harapan dapat mengengarilasi hasil, tidak saja pada OPD tertentu saja tetapi kepada seluruh OPD se Kabupaten. Penelitian ini meneliti pengaruh variabel independen seperti, Komitmen Organisasi, Regulasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap variabel dependen yaitu Implementasi Transaksaksi Non Tunai.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), Merilee S. Grindle (1980), Van Meter dan Van Horn (1975) dan Mazmanian dan Sabatier (1983). untuk mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu dan memberikan hasil yang lebih baik. Teori ini digunakan karena dinilai mampu menjelaskan faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi keberhasilan dan mengukur seberapa besar efektif dan efisiennya kinerja implementasi suatu kebijakan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metoda analisis *Structural Equation Modelling (SEM) Variance Based* dengan alat analisis *Partial Least Squares (PLS)*.

TINJAUAN TEORITIS

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari perspektif teori implementasi, Edwards III (1980) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel disposisi. Disposisi yang dimaksud merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dari tinjauan teoritis yang dikemukakan tersebut disimpulkan bahwa Komitmen Organisasi adalah partisipasi kerja dan loyalitas terhadap organisasi yang ditunjukkan oleh pimpinan dan staf di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tanpa adanya komitmen tersebut diduga implementasi kebijakan tidak akan sesuai dengan tujuan yang digarapkan. Untuk itu hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

H1 : Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pengaruh Regulasi terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Regulasi adalah segala bentuk peraturan untuk mengendalikan suatu kegiatan. Regulasi dalam hal ini terkait dengan perubahan peraturan, keputusan dan perundang-undangan dalam waktu yang singkat, dan perubahan tersebut berbeda dengan peraturan sebelumnya. Lubis (2016) menyatakan bahwa regulasi yang berubah begitu cepat diduga akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam penerapan peraturan tersebut Fatimah Zuria, 2016;46). Sedangkan menurut penelitian Azhar (2007) menunjukkan regulasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun tidak sesuai dengan hasil penelitian Rahmansah (2012) yang menyatakan bahwa regulasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemerintah Daerah harus mempersiapkan berbagai hal salah satunya adalah regulasi, yaitu penyesuaian regulasi Pemerintah Daerah dengan penerbitan Instruksi Kepala Daerah mengenai implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Tanpa regulasi sebagai pedoman bagi pelaku maka dan pemahaman terhadap regulasi tersebut maka implementasi akan menemukan kendala. Regulasi ini menjadi wajib sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ Tahun 2017. Butir keempat menyebutkan bahwa Bupati/Walikota sebagai kepala daerah perlu menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dalam bentuk regulasi juga merupakan dasar bagi kepala daerah dalam melaksanakan implementasi transaksi non tunai yang meliputi transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran paling lambat tanggal 1 Januari 2018. Dengan demikian, dari beberapa uraian dan temuan penelitian diatas dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H2 : Regulasi Berpengaruh terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Suatu sistem sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Desi Indriasari, 2010). Sedangkan jika dilihat dari persepektif teori Edwards III (1980) dijelaskan bahwa dalam hal pengimplementasikan kebijakan perlu adanya sumber daya yang mempengaruhi tingkat keefektifan sebuah implementasi. Hal ini juga didukung oleh teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi salah satunya sumberdaya. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya seperti sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan, sumberdaya manusia juga termasuk objek kebijakan publik itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi transaksi non tunai diduga dipengaruhi oleh dimensi dan indikator dari kualitas SDM dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi dari kompetensi sumber daya yang mereka miliki, semakin berkualitas SDM maka kinerja implementasi akan semakin baik. Oleh karena itu maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kompetensi SDM Berpengaruh terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari perspektif teori implementasi yang dikembangkan Edwards III (1980) dan Van Meter dan Van Horn (1975), menjelaskan bahwa dalam pengimplementasikan kebijakan perlu adanya sumber daya yang mempengaruhi tingkat keefektifan sebuah implementasi seperti penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan keberhasilan sebuah implementasi.

Teknologi informasi selain sebagai penyimpanan informasi juga berfungsi penyebaran informasi sangat dibutuhkan dalam keterandalan laporan keuangan hal ini dibuktikan oleh penelitian Desi Indriasari (2010) hasilnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Seperti halnya Desi Indriasari (2010), Deswati Supra (2016), Lukman Pasaribu (2016) menemukan bahwa kualitas teknologi informasi merupakan variabel independen yang paling mempengaruhi seperti pada penerapan SAP berbasis akrual dan secara parsial variabel teknologi SIMDA berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan akuntansi basis akrual. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma, 2013; Fatimah Zuria, 2016), yang menemukan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual dan perangkat pendukung (Teknologi Informasi) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Tanpa teknologi informasi yang terintegrasi maka implementasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Adanya program aplikasi yang terintegrasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut :

H4 : Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah metode kuantitatif dan penetapan hipotesis mengacu pada kajian teoritis dan empiris dimana variabel-variabel penelitian yang dihasilkan dari hipotesis tersebut dilengkapi dengan instrumen penelitian. Alasan pendekatan ini sesuai dengan pendapat Creswell (2014) yang menyatakan penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel ini, pada gilirannya, dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini seluruh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan data yang dari BKP2D Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 2.068. Sedangkan kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan dan PPTK pada 32 OPD di Kabupaten Indragiri Hulu, sampel ini diambil atas pertimbangan bahwa yang bersangkutan terlibat langsung dalam implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data menggunakan software SmartPLS versi 3.2.1.m3. PLS merupakan analisis persamaan struktural berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Komitmen Organisasi (X₁)

Komitmen Organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemauan dan kesiapan menjalankan visi, kemauan dan kesiapan dalam segala tindakan guna mencapai misi organisasi, memfokuskan diri pada tujuan organisasi, kemauan dan kesiapan pencapaian sasaran, bersedia menghadapi resiko dalam mencapai tujuan organisasi, menerima penghargaan atas prestasi yang telah dibuat. Variabel ini diukur dengan indikator yang dikembangkan dari Abdul Rasyd (2017) Instrumen tersebut terdiri dari 8 butir pernyataan dengan alat ukur skala *likert*.

Regulasi (X₂)

Regulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedoman bagi pelaku implementasi untuk dapat menjalankan aturan tentang implementasi transaksi non tunai. Definisi ini di adopsi dan dikembangkan dari penelitian Fatimah Zuria (2016) dan Fadilah Madjid (2016). Instrumen tersebut terdiri dari 5 butir pernyataan dengan alat ukur skala *likert*.

Kompetensi SDM (X₃)

Kompetensi SDM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh pengelola keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan tugas dan jabatan dalam mengimplementasikan transaksi non tunai. Variabel kompetensi SDM diukur melalui indikator pengetahuan, keterampilan dan perilaku, instrumen dimodifikasi dari penelitian Ni Made Sudiarianti (2015) terdiri dari 19 butir pernyataan dengan alat ukur skala *likert*.

Teknologi Informasi (X₄)

Teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gabungan semua perangkat yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan manusia (*pemakai*) yang diintegrasikan melalui teknologi komunikasi dalam rangka pelaksanaan implementasi transaksi non tunai. Variabel ini diukur melalui instrumen yang dimodifikasi dari penelitian Deswati Supra (2016), Lukman Pasaribu (2016), Fatimah Zuria (2016) dan Desi Indriasari (2010) terdiri dari 9 butir pernyataan dengan alat ukur skala *likert*.

Transaksi Non Tunai (Y).

Implementasi Transaksi Non Tunai dalam penelitian ini adalah tindakan pemerintah daerah dalam melaksanakan transaksi non tunai sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor: 910/1867/SJ Tahun 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Instrumen tersebut terdiri dari 10 butir pernyataan dengan alat ukur skala *likert*.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Statistik Diskriptif

Variabel implementasi transaksi non tunai dengan nilai mean aktual $>$ mean teoritis yaitu $44,01 > 30$ sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata variabel implementasi transaksi non tunai dipersepsikan tinggi atau baik oleh responden. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelola keuangan dan PPTK di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu telah mulai menerapkan transaksi non tunai.

Variabel komitmen organisasi dengan nilai mean kisaran aktual komitmen organisasi sebesar 36,40 dan nilai mean kisaran teoritis sebesar 24. Nilai mean aktual $>$ mean teoritis yaitu $36,40 > 24$ sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata variabel komitmen organisasi dipersepsikan tinggi atau baik oleh responden. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya komitmen organisasi pengelola keuangan dan PPTK dalam rangka melaksanakan implementasi transaksi non tunai di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Variabel regulasi dengan nilai mean aktual $<$ mean teoritis yaitu $14,93 < 15$ sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata variabel regulasi dipersepsikan Rendah atau kurang baik oleh responden. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengelola keuangan dan PPTK terhadap regulasi dalam rangka melaksanakan implementasi transaksi non tunai di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Variabel Kompetensi SDM dengan nilai mean kisaran aktual Kompetensi SDM sebesar 88,33 dan nilai mean kisaran teoritis sebesar 57. Nilai mean aktual $>$ mean teoritis yaitu $88,33 > 57$ sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata variabel

Kompetensi SDM dipersepsikan tinggi atau baik oleh responden. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besarnya Kompetensi SDM pengelola keuangan dan PPTK dalam rangka melaksanakan implementasi transaksi non tunai di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Variabel teknologi informasi dengan nilai mean kisaran aktual teknologi informasi sebesar 40,09 dan nilai mean kisaran teoritis sebesar 27. Nilai mean aktual > mean teoritis yaitu $40,09 > 27$ sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata variabel teknologi informasi dipersepsikan tinggi atau baik oleh responden. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besarnya pemanfaatan teknologi informasi oleh pengelola keuangan dan PPTK dalam rangka melaksanakan implementasi transaksi non tunai di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen. Terdapat tiga nilai yang harus diperhatikan pada tahap ini yaitu pengujian validitas dengan melihat nilai *convergent validity* dan *discriminant validity* serta uji reliabilitas dengan melihat nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*.

Uji convergent validity

Uji *Convergent validity* digunakan untuk mengetahui item-item instrumen yang dapat digunakan sebagai indikator dari keseluruhan variabel laten. Hasil uji ini diukur berdasarkan besar nilai *loading factor (outer loading)* dari indikator konstruk. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,50 dianggap cukup (Chin, 1998). Hasil pengujian *convergent validity* menunjukkan seluruh *outer loading/ loading factor* memiliki nilai lebih besar dari 0,70, sehingga pengukuran ini dapat disimpulkan telah memenuhi persyaratan validitas konvergen dan dinyatakan valid.

Uji Discriminant Validity

Uji *discriminant validity* adalah pengukuran validitas dengan cara membandingkan korelasi indikator suatu konstruk tersebut dengan konstruk lainnya yang diukur dengan nilai *cross loading*. Jika korelasi indikator konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain. Oleh karena itu, uji *discriminant validity* digunakan untuk menggambarkan korelasi antara variabel yang seharusnya tidak berhubungan. Korelasi dinyatakan valid dengan nilai korelasi *cross loading* indikator lebih besar dari nilai korelasi variabel laten yang lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai *loading factor* untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten telah memiliki nilai *loading factor* yang paling besar dibanding nilai *loading* variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten telah memiliki *discriminant validity* yang baik dan dinyatakan dinyatakan valid.

Average variance extracted (AVE)

Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah Pengukuran dengan metode *Fornell-Larcker* yang dilakukan dengan membandingkan *square roots* atas AVE dengan korelasi *vertical laten*. Validitas diskriminan dikatakan baik apabila *square root* atas AVE sepanjang garis diagonal lebih besar korelasinya antara satu konstruk dengan yang lainnya. Dari tabel 1 dibawah ini dapat diketahui bahwa nilai

square root atas AVE sepanjang garis diagonal lebih besar korelasinya antara satu konstruk dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki tingkat validitas yang baik dan diketahui seluruh variabel dinyatakan valid.

Composite Reliability

Composite reliability menggambarkan konsistensi pernyataan dalam instrumen dan melihat reliabel indikator. Uji *composite reliability* seluruh variabel dinyatakan reliabel apabila nilai loading-nya di atas 0,70 (Chin dalam Hartono dan Abdillah, 2014:61). Nilai *composite reliability* masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1
Uji Validitas Square Root of Average(AVE)

Variabel	KO	R	KSDM	TI	TNT
KO	0,865				
R	0,529	0,823			
SDM	0,616	0,444	0,828		
TI	0,655	0,632	0,681	0,812	
TNT	0,673	0,546	0,687	0,707	0,779

Sumber : Data Olahan Smart PLS 3 (2019)

Tabel 2
Hasil Uji Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Komitmen Organisasi (KO)	0,959	Reliabel
Regulasi (R)	0,913	Reliabel
Kompetensi SDM (SDM)	0,976	Reliabel
Teknologi Informasi (TI)	0,946	Reliabel
Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	0,939	Reliabel

Sumber : Data Olahan Smart PLS 3 (2019)

Berdasarkan Tabel 2, hasil *composite reliability* menunjukkan seluruh variabel menunjukkan bahwa nilai *loading*-nya di atas 0,70 yang berarti seluruh variabel dinyatakan reliabel.

Cronbachs alpha

Cronbachs alpha menggambarkan konsistensi pernyataan dalam instrumen. Instrumen dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji *cronbachs alpha* seluruh variabel dinyatakan reliabel apabila nilai loading-nya di atas 0,70. Nilai *cronbachs alpha* masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Hasil Uji Cronbachs Alpha

Variabel	Cronbachs alpha	Keterangan
Komitmen Organisasi (KO)	0,951	Reliabel
Regulasi (R)	0,883	Reliabel
Kompetensi SDM (SDM)	0,974	Reliabel
Teknologi Informasi (TI)	0,935	Reliabel
Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	0,928	Reliabel

Sumber : Data Olahan Smart PLS 3 (2019)

Hasil *cronbachs alpha* pada Tabel 3 menunjukkan seluruh variabel dinyatakan reliabel. Maka, berdasarkan hasil uji pengukuran model di atas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, sehingga pengujian dapat dilanjutkan.

Model Struktural (Inner Model)

Inner model menunjukkan hubungan variabel laten dengan variabel yang diteliti lainnya. Evaluasi *inner model* dengan uji *bootstrapping* menghasilkan koefisien determinasi *R-square*, *Q-square*, *path coefficients* dan *latent variable correlations*. Hasil evaluasi inner model dijelaskan sebagai berikut:

Koefisien determinasi R-square (R2)

Pengujian model struktural (*inner model*). Goodnes of fit model struktural pada inner model diuji menggunakan nilai predictive-relevance (Q2). Nilai R² setiap variabel endogen dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Koefisien Determinasi R2

	R Square	R Square Adjusted
Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	0,626	0,616

Sumber : Data Olahan Smart PLS 3 (2019)

Dari Tabel 4 diatas dapat diperoleh nilai R Square sebesar 0,626. Artinya adalah sebesar 62,6% variable Implementasi Transaksi Non Tunai dipengaruhi oleh Komitmen Organisasi, Regulasi, Kompetensi SDM dan Teknologi Informasi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) akan memperlihatkan lima hipotesis. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t (t-test) pada setiap jalur pengaruh antara variabel. Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi dengan metode *bootstrapping* terhadap sampel, pengujian ini dimaksudkan untuk meminimalkan masalah pada data penelitian. Hipotesis penelitian ini menggunakan alpha 10% dengan nilai t-tabel sebesar 1,96 (Latan dan Ghozali, 2012:85). Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis dengan Partial Least Square

Pengaruh	Original Sample Statistics	T	P Values
Komitmen Organisasi -> Implementasi Transaksi Non Tunai	0,257	3,657	0,000
Regulasi -> Implementasi Transaksi Non Tunai	0,110	1,687	0,092
Kompetensi SDM -> Implementasi Transaksi Non Tunai	0,300	4,327	0,000
Teknologi Informasi -> Implementasi Transaksi Non Tunai	0,265	2,985	0,003

Sumber : Data Olahan Smart PLS 3 (2019)

Dari Tabel 5 diatas maka dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai.

Diperoleh nilai t-statistik 3,657 dan P value 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik (3,657) lebih besar dari t table (1,96) dan P value (0,000) lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan cara pengambilan keputusan hipotesis pada bab III, maka dengan demikian Ha 1 diterima dan Ho.1 ditolak). Ini membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi non tunai. Diperoleh koefisien sebesar 0,257 yang berarti bahwa setiap peningkatan komitmen organisasi sebesar satu satuan maka akan meningkatkan implementasi transaksi non tunai sebesar 0,257 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

Hipotesis 2: Pengaruh Regulasi terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai.

Diperoleh nilai t-statistik 1,687 dan P value 0,092. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik (1,687) lebih kecil dari t table (1,96) dan P value (0,092) lebih besar dari 0,05. Berdasarkan cara pengambilan keputusan hipotesis, maka dengan demikian Ha 2 ditolak dan Ho.2 diterima). Ini membuktikan bahwa regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi non tunai.

Hipotesis 3: Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai.

Diperoleh nilai t-statistik 4,327 dan P value 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik (4,327) lebih besar dari t table (1,96) dan P value (0,000) lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan cara pengambilan keputusan hipotesis, maka dengan demikian Ha 1 diterima dan Ho.1 ditolak). Ini membuktikan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi tunai

Hipotesis 4: Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai.

Diperoleh nilai t-statistik 2,985 dan P value 0,003. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik (2,985) lebih besar dari t table (1,96) dan P value (0,003) lebih kecil dari 0,05. Maka dengan demikian Ha 1 diterima dan Ho.1 ditolak). Ini membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi tunai. Diperoleh koefisien sebesar 0,265 yang berarti bahwa setiap peningkatan teknologi informasi sebesar satu satuan maka akan meningkatkan implementasi transaksi non tunai sebesar 0,265 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi non tunai.
3. Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi transaksi non tunai.
4. Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi non tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyd., 2017, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empiris Pada Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau). *Tesis Program Pascasarjana Universitas Riau*, Riau.
- A.G. Subarsono., 2011, *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Azhar., 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintahan Kota Banda Aceh, *Tesis Maksi USU*, Medan.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2016. *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan*, <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp> , diakses tanggal 5 Februari 2016.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fadilah Madjid., 2016, Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Di Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros). *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*, Makassar.
- Fatimah Zuria., 2016, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Tesis Maksi USU*, Medan.
- Imam Ghozali, 2014, *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*, Edisi 4, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Imam Ghozali, dan H Latan, 2012, *Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Iqlima Azhar., 2017, Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah dan Regulasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, Hal 49-58.
- Lukman Pasaribu., 2016, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Basis Akrua dengan Pengendalian Intern Akuntansi Sebagai Variabel Intervening Pada Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan, *Tesis Maksi USU*, Medan.
- M Arafat Imam G., 2017, *Meneropong Fokus Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implementasinya Sesuai Dengan Best Practice*, <https://teorikeuangannegara.blogspot.com/2017/05/meneropong-fokus-kebijakan-pengelolaan.html>, diakses 8 Desember 2018.
- Nikesari dan Roy., 2017, Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *Skripsi Departement of Administrative Science, Faculty of Social Science and Political Science, University of Indonesia*, Depok.

- Rahmansah., 2012, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Tesis Universitas Terbuka*, Jakarta.
- Republik Indonesia., 2016, Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Republik Indonesia., 2017, Inpres Nomor 10 Tahun 2017. tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Republik Indonesia., 2017, Surat Edaran Mendagri Nomor: 910/1867/SJ Tahun 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Santi Retno A., 2018, Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai (Non Cash) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, Yogyakarta.
- Todung Mulya Lubis., 2013, *Perangi Korupsi, Batasi Transaksi Tunai, Disampaikan dalam acara Seminar dan FGD Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia – Surabaya*, 3 Desember 2012 dan Medan, 4 Februari 2013.
- <https://www.beritasatu.com/nasional/136802/sistem-transaksi-non-tunai-dalam-keuangan-daerahnegara-bisa-cegah-korupsi>. Diakses pada tanggal 15 November 2017.
- <https://apkasi.org/nasional/terkait-se-transaksi-non-tunai-pemda-masih-hadapi-banyak-kendala/>. Diakses tanggal 25 November 2017.
- <http://www.bpkp.go.id/berita/read/19029/0/Evaluasi-Pelaksanaan-Transaksi-Non-Tunai-Pemprov-Kaltim-oleh-Bank-Kaltimtara.bpkp>. Diakses Tanggal 5 Pebruari 2018 Pukul 15:39.